



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 937/II/XII/2016

**Manfaatkan Panas Bumi
Perkuat Regulasi**

**Legislator Dukung
Penghapusan UN**

**Pemerintah Diminta Siapkan
Program Studi DLP
Secara Komprehensif**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto meninjau pemanfaatan energi panas bumi di Kamojang, Garut, Jabar

Manfaatkan Panas Bumi Perkuat Regulasi

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke Lapangan Panas Bumi PT Pertamina Geothermal Energy Kamojang ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan *Senior Official Meeting* (SOM) tentang pengembangan panas bumi di Indonesia. Tinjauan lapangan panas bumi di Jawa Barat ini merupakan pionir perluasan tempat pemanfaatan panas bumi nasional.

Dalam kunjungannya, Agus berkomitmen akan mendorong semua pemangku kepentingan, baik Kementerian ESDM, Kementerian LHK, BUMN penyedia panas bumi dan lembaga lainnya yang bersangkutan, agar memaksimalkan pemanfaatan panas bumi. Selain itu dia juga akan melakukan pengawalan untuk penguatan regulasi teknis guna pemanfaatan panas bumi. Ini bertujuan agar mendukung program prioritas pembangunan pembangkit listrik 35 ribu mega watt, yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

"Kita tetap akan mendorong terus sembari memperkuat masalah regulasinya. Sehingga bagi yang menggunakan memiliki regulasi yang mantap. Lebih terkendali dan menguatkan geothermal," tandas Agus di Area Kamojang PT. PGE, Jawa Barat, Senin (28/11) sore.

Persoalan regulasi realisasi pemanfaatan panas bumi, Agus

menjelaskan saat ini yang diperlukan adalah peraturan pemerintah yang menata pemanfaatan panas bumi. Setelah itu akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri yang menentukan harga jual-beli panas bumi.

"Kita menunggu PP pemanfaatan panas bumi, karena ini akan digunakan untuk pembangkit listrik. Apabila PP sudah keluar akan diikuti dengan Permen, yang menyatakan harga dari geothermal. Sehingga memberikan kemitampan bagi pengusaha-pengusaha geothermal yang menggali dan menyediakan geothermal," jelas Agus.

Dia juga menyempatkan kunjungan ke laboratorium PGE Area Kamojang, setelah itu dilanjutkan ke sumur produksinya. Saat di lapangan Agus menegaskan kembali akan menguatkan pemanfaatan geothermal guna mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Karena minyak bumi sebentar lagi bisa habis.

Tetapi geothermal memiliki sifat keberlanjutan, terus-menerus akan ada.

"Kita harus mendorong semuanya, regulasinya harus betul-betul dikuatkan. Kita harus punya keinginan bersama untuk menguatkan geothermal," ujar Agus.

Dalam kunjungan ini Agus didampingi Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin dan Direktur Indonesia Power Eri Prabowo. Soal kelestarian lingkungan juga tidak luput dari perhatian Agus, menurutnya menggunakan geothermal ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan energi fosil.

"Kita juga harus memperhatikan lingkungan. Kita sudah menandatangani COP 21 di Paris mengenai dampak lingkungan. Ikut melestarikan lingkungan dunia dengan penggunaan geothermal. Geothermal menghasilkan energi yang ramah lingkungan, baru serta terbarukan," paparnya. ■

(ekamp), foto: eku/hr

Gonjang-ganjing Politik Tak Pengaruhi Realisasi Panas Bumi

Di tengah riuh-ramai rivalitas politik menjelang pilkada serta dinamika dan antusiasme perpolitikan parlemen tak menyusutkan semangat dan tekad Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto dalam merealisasikan pemanfaatan panas bumi. "Saya sudah bertekad untuk mendukung geothermal," tandas Agus di PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang, Jawa Barat, Senin (28/11).

Dalam situasi animo para politisi yang terkonsentrasi pada politik Ibukota, Agus mengambil pilihan yang berbeda dari kebanyakan, pemanfaatan panas bumi, menjadi terobosannya. Menurut Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang ini, realisasi pemanfaatan geothermal sangat penting untuk mendukung target pasokan listrik 35 ribu mega watt. Oleh sebab itu dia rela meninggalkan sejenak gonjang-ganjing politik Jakarta.

"Tidak ada politisi yang mengambil masalah itu. Gonjang-ganjing politik yang lain saya tinggal kemari. Saya ditelepon Sekjen Golkar, saya mending kemari. Saya pikir ini lebih penting," ungkapnya di hadapan Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin dan Direktur Indonesia Power Eri Prabowo.

Di tengah-tengah pihak yang masih banyak mempertanyakan efektifitas manfaat panas bumi. Agus merasa tertantang untuk merealisasikan pemanfaatan energi ini, guna mengatasi kekurangan pasokan listrik nasional.

"Dalam pilihan saya, politisi kan harus ada pilihan, geothermal juga saya jadikan isu dukungan. Karena saya melihat seluruh pihak belum memiliki kepentingan politik yang sama masalah geothermal," tuturnya.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto

Kegigihan Agus juga ditunjukkan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dia meminta agar presiden memberikan dukungan. "Mohon bisa didukung," ujar Agus menceritakan saat dia bertemu dengan Jokowi, "oh saya dukung," kata Agus menirukan tanggapan Jokowi.

Agus juga mengharapkan agar presiden memberikan jalan kepada menteri-menteri terkait urusan energi nasional, supaya bekerja serius dalam

mewujudkan pemanfaatan panas bumi. "Jangan dukung saya aja, menteri-menterinya juga," ujarnya.

Menurut Agus pemanfaatan panas bumi adalah cara yang paling realistis untuk menghasilkan listrik 35 ribu mega watt. "Bahkan saat saya bertemu dengan Pak Jokowi, saya sampaikan, Pak Jokowi bercita-cita punya listrik 35 ribu mega watt. Itu *impossible*, kalau tidak menggunakan geothermal," paparnya. ■

(eko.mp), foto: Ekor/bkr



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpri.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Muriyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) | ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN |

Ketua DPR Puji Demo 212 Damai

Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan pujian kepada para demonstran yang menggelar aksi pada, Jumat (2/12). Sanjungan yang disampaikan karena unjuk rasa yang berlangsung dari pagi sampai sore berjalan secara aman dan damai.

“ Saya menyampaikan rasa syukur dan haru yang mendalam atas aksi damai yang berlangsung hari ini. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh anak bangsa yang tergabung dalam Aksi Super Damai hari ini,” ujar Setnov sapaan akrab Ketua DPR dalam rilis yang diterima Parlemen.

Setnov mengatakan, terlebih dari pada itu, massa telah menunjukkan aksi yang luar biasa teduh dan sejuk, dengan diiringi pelaksanaan Shalat Jumat secara berjamaah meski dengan suasana hujan deras massa begitu khusyuk menjalankan ibadah. “Mereka telah menjalankan dan mencontohkan bagaimana aksi yang sesungguhnya dilakukan dengan damai dan tertib,” paparnya.

Hari publik dipertunjukkan oleh suasana kerukunan kebangsaan yang sejati, seperti yang dicita-cita para pendiri bangsa dalam

konstitusi negara. Massa juga telah menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang damai yang senantiasa menghadirkan kesejukan bagi bangsa Indonesia.

Setnov, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam wadah kebangsaan dan kenegaraan. Dia juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menjawab aspirasi masyarakat.

“Saya juga mengapresiasi pesan teduh Bapak Presiden Joko Widodo, meski singkat namun padat. Yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang negarawan sejati yang mampu menghadirkan negara dalam menjawab setiap apresiasi masyarakat,” jelasnya.

Ratusan ribu hingga jutaan massa dari kalangan umat Islam telah membuktikan



Ketua DPR RI Setya Novanto

bahwa Islam senantiasa menebarkan kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama dan ras yang berbeda beda.

“Semoga kerukunan ini akan terus terjaga dengan baik. Sehingga tujuan kita berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya akan kita raih dan wujudkan bersama,” harap Setnov. ■

(eko.np), foto : iwan armanias/br

DPR Berharap RUU Pemilu Perkuat Keterwakilan Perempuan

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu Hetifah Sjaifudian berharap penguatan keterwakilan perempuan dalam Parlemen hingga 30 persen bisa terakomodir dalam RUU Penyelenggara Pemilu.

Hal tersebut diungkapkannya usai Rapat Kerja Pansus RUU tentang Penyelenggara Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/12).

Menurut politisi dari F-Golkar itu, belum ada perubahan yang signifikan terkait keterwakilan perempuan di Parlemen, baik di tingkat di pusat, provinsi maupun kabupaten. Meskipun, UU Paket Politik sebelumnya telah mengatur keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30 persen.

Disebutkannya, penerapan *zipper system* yang mengatur setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan hanya menghasilkan setidaknya 18% anggota parlemen perempuan di tingkat pusat, 16% di provinsi dan 12% di kabupaten kota.

“Nah, kalau kita ingin 30% parlemen diisi oleh perempuan, maka harus ada terobosan baru. Kalau tetap seperti sekarang, pasti stagnan,” tandas Hetifah.

Lebih lanjut, Hetifah menjelaskan diperlukan komitmen bersama untuk menambah representasi perempuan dalam Parlemen. Diantaranya, memberikan kesempatan lebih



Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian

banyak terhadap pencalonan legislatif dengan menggunakan zipper system 1 banding 1, yakni 1 perempuan berbanding 1 laki-laki.

"Memang ini belum dibahas secara

formal di dalam Pansus, tetapi kalau kita berkomitmen ingin menambah keterwakilan perempuan, yah partai politik juga harus memberikan kesempatan, bukan hanya untuk menjadi

caleg tetapi untuk memenangkan pertarungan. Oleh sebab itu, sistem pemilu juga harus lebih ramah pada perempuan," imbuh politisi dari dapil Kalimantan Timur itu. ■

(amm.nsp) Foto: jeka/hr

Komisi X Prihatinkan Minimnya Anggaran PPLP dan PPLM

Politisi Partai Gerinda Nuroji memimpin kunjungan kerja spesifik (kunspek) Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan didampingi 17 orang Anggota Dewan, menyambangi kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Selatan, di GOR Sudiang sekaligus meninjau Asrama Atlet. Jumat (25/11) lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Dispora Sulsel, Muhlis yang menerima kunjungan Tim Kunspek Komisi X DPR RI mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka meninjau terkait konsep olahraga unggulan daerah yang dikembangkan oleh Dispora Sulsel. Selain itu, melihat proses pembibitan atlet di PPLP, SMANKO, PPAPD dan PLM.

Nuroji mengatakan, kunjungan ini untuk melihat konsep pendidikan keolahragaan di Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) serta mendengar masalah-masalah dalam lingkup Dispora.

"PPLP dan PPLM adalah salah satu strategi pengembangan olahraga yang dilakukan Kemenpora melalui pembibitan. Kita melakukan peninjauan langsung di lapangan bagaimana pelaksanaan pembibitan olahraga ini, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi," jelasnya.

Pihaknya telah melihat fakta di lapangan mengenai keberadaan Asrama Atlet Provinsi Sulsel yang ditunjang dengan sarana olahraga dan asrama representatif tetapi tidak terawat dengan baik. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini, terkait anggaran yang minim, sehingga tidak sesuai dengan tujuan, fungsi serta target yang ingin dicapai.

Menurut Muhlis, jumlah mahasiswa PPLM Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 15 orang, 2 mendapat beasiswa namun sisanya 13 tidak mendapatkan beasiswa. Sementara alokasi anggaran untuk PPLM sejak tahun 2015 dihentikan, sehingga kondisi mahasiswanya saat ini hanya

l a t i h a n semampunya tanpa ada bantuan anggaran.

PPLM di Sulawesi Selatan telah ada sejak tahun 2010 dan telah memiliki asrama yang dibangun oleh Kemenpora RI sebanyak 20 kamar, namun kondisi asrama tersebut kurang terawat dan banyak kamar yang tidak terisi dan dimanfaatkan karena jumlah peserta PPLM hanya 15 orang.

Nuroji mengakui kita memang berkendala anggaran. Tadi tergambar Rp105 milyar untuk tiga provinsi. Untuk pembinaan PPLP dan PPLM. Itu sangat jauh dari kebutuhan. Kalau diharapkan atlet baik yang muncul dari lembaga ini, paling tidak anggarannya harus 10 kali lipat dari sekarang. "Itu data yang kita dapatkan".

"Komisi X DPR RI akan memperjuangkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), khususnya terkait dengan pengembangan olahraga unggulan dan pembinaannya" kata Narodji.

Apalagi informasinya, SKO cukup



Tim Kunspek Komisi X DPR RI ke Dispora Sulsel

berhasil mencetak atlet-atlet potensial dan bisa berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Ini merupakan hal yang luar biasa dan perlu untuk dikembangkan di semua daerah," jelasnya.

Anggota Tim Kunspek Dadang Rusdiana mengatakan, kelangsungan operasional sekolah yang didirikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu hanya mengandalkan bantuan dari APBD. Ke depan, lanjutnya, sekolah olahraga yang ada di Sulawesi Selatan ini layak untuk mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintahan pusat.

"Kedatangan kami ini untuk kunjungan kerja ke daerah-daerah. Sebagai komisi yang bergerak di bidang pendidikan dan olahraga, kami memilih kunjungan ke Sulawesi Selatan karena daerah ini punya sekolah khusus yang memproduksi atlet. Ini sangat luar biasa," kata politisi Hanura ini menambahkan. ■

(hr) foto: ceta hindra/hr

Tak Ada Satu Negara pun Yang Kebal Terorisme dan Radikalisme

Dalam sesi *General Debate* di Sidang Pleno ke-9 *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Siem Reap, Kamboja, Selasa (29/11), delegasi DPR RI berkesempatan menyampaikan beberapa pandangannya terkait dengan sejumlah isu di kawasan Asia.

Paparan itu di sampaikan oleh Anggota Delegasi DPR RI Dave Akbarshah Fikarno. Salah satu isu yang disampaikan adalah tentang radikalisme dan terorisme. Indonesia menilai pada saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang kebal dari aksi terorisme dan radikalisme.

"Asia dan Pacific secara kolektif perlu berupaya untuk mengatasi radikalisme dan terorisme baik didalam negeri maupun tingkat regional. Kunci untuk menjaga kedamaian itu adalah hubungan yang baik diantara kita melalui dialog yang konstruktif, mendorong pluralisme, dan saling menghormati terhadap integritas teritorial serta kedaulatannya," kata Dave dihadapan 25 delegasi parlemen Asia.

Dave melanjutkan, sebagai salah satu negara dengan demokrasi dan jumlah populasi muslim terbesar, Indonesia siap untuk menjadi kekuatan pendorong bagi perdamaian.

"Dalam menjaga perdamaian, negara-



Anggota BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno

negara berkembang harus memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga dan memastikan perdamaian dan tentunya kemakmuran, serta kita juga harus menghormati penegakan hukum," jelas politisi dari Partai Golkar ini.

Asia, lanjut Dave, juga harus bisa dalam mengelola konflik, misalnya

memelihara perdamaian di laut China Selatan dan semenanjung Korea. "Lalu kita juga harus memastikan agar Asia tidak menjadi arena perebutan kekuasaan oleh negara-negara besar," tambahnya.

Selanjutnya, Dave berujar, bahwa situasi damai sangat diperlukan, terlebih berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan agenda SDGs yaitu memerangi dan penanggulangan kemiskinan, penegakan HAM, serta memberikan perhatian pada hubungan sosial dan ekonomi, serta perlindungan terhadap lingkungan.

Di akhir paparannya, Dave berharap melalui Sidang APA ini dirinya yakin dengan adanya persatuan dikawasan Asia, dapat secara efektif dalam menghadapi rintangan, dengan saling memperkuat dalam menjaga perdamaian dan stabilitas politik di kawasan ini. "Saya yakin, kerjasama ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berarti seperti yang diharapkan," tutupnya. ■

(ttd), Foto: iwan/br

Komisi IV Pertanyakan Proses Revisi Permen KP No.1/2015

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mempertanyakan program teralokasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan apakah sudah terkontrol penuh oleh Kementerian, dan bagaimana mekanisme yang telah dilakukan oleh KKP.

“Sejauh mana progres revisi terhadap kebijakan Permen KP nomor 1 tahun 2015, karena sudah mulai dilakukan *public consultation*. Hal ini bertujuan agar publik juga dapat mengetahui bahwa ada proses untuk perbaikan terhadap Permen tersebut,” ucap Herman dalam pengantar RDP Komisi IV DPR RI dengan pejabat Eselon I KKP, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Ia juga mempertanyakan tentang

status kebijakan Permen KP no. 10 tahun 2015 jo no. 56 tahun 2014 tentang penghentian sementara perijinan usaha perikanan tangkap, di WPP yang berlaku sampai tanggal 31 Oktober 2015.

"Bagaimana langkah konkrit penyaluran alat tangkap dan bantuan-bantuan lainnya yang sudah mendapat persetujuan dalam tahun anggaran 2016. Dan bagaimana tindak lanjut dari KKP terkait dengan kajian reklamasi wilayah

pesisir di seluruh Indonesia, terutama di Teluk Jakarta dan Teluk Benoa?," tanya Herman.

Menyikapi pembuatan kapal untuk nelayan kecil di tahun 2016 yang sampai saat ini masih banyak kendala dan terjadi pengurangan, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan dan solusi yang telah dilakukan oleh KKP.

"Hal ini merupakan proses pembelajaran bagi kita, karena sangat mudah mentargetkan untuk pencapaian



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron berbincang dengan pejabat Eselon I Kementerian KKP

sesuatu, tetapi proses dan mekanismenya yang membuat hambatan-hambatan sehingga agak lambat bagi kita untuk merealisasikannya," ujarnya.

Keberhasilan dan upaya KKP dalam membuka gerai perijinan juga menjadi

sorotan Dewan dalam rapat tersebut, karena selama ini masih banyak mengalami hambatan. Promosi lebih baik dari pada realisasinya, lanjut Herman, Perijinan tidak boleh lebih dari 6 hari, tetapi kenyataannya proses yang dialami masyarakat masih berlarut-larut.

Terkait Hasil program sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di 15 pulau-pulau terluar, yang menjadi unggulan KKP saat ini pun tak lepas dari pantauan Komisi IV. Termasuk juga dengan dimulainya kembali pembangunan beberapa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. ■

(dep.mpf), foto: iyanadi/hr

Legislator Dukung Penghapusan UN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengaku, dirinya mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Pasalnya, selama ini kurikulum yang digunakan tidak terpusat pada pemerintah tetapi pada satuan pendidikan masing-masing yaitu sekolah.

“Jika kurikulum di buat sekolah otomatis kemampuan siswa di setiap sekolah akan berbeda, namun kenapa pemerintah selama ini masih campur tangan apalagi mengadakan evaluasi penentu kelulusan. Padahal kurikulum dibuat oleh guru yang lebih paham karakteristik siswanya,” kritisi Sutan, saat dihubungi Parlemenaria via telepon, Rabu (30/11).

Menurut politisi F-Gerindra itu, sejauh ini UN hanya dijadikan sertifikasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, UN dinilai belum akurat untuk mengukur seberapa tingkat kecerdasan siswa.

Alasan Sutan mendukung penghapusan UN, karena selama ini melihat ajaran yang diberikan guru kepada anak didiknya menjadi sia-sia. Mengingat, keputusan lulus tidaknya murid, ditentukan oleh pemerintah yang mengeluarkan soal UN. Padahal, yang memahami kemampuan murid, adalah gurunya masing-masing.

"Artinya terjadi ketidakadilan dalam dunia pendidikan Indonesia, tiap sekolah memiliki standar kelulusannya berbeda," tegas Sutan.

Selain itu, masih kata Sutan, UN tidak bisa dijadikan sarana mengontrol mutu, karena mutu lahir dari sebuah proses dan bukan sekali evaluasi. Bahkan, UN tidak membentuk watak kerja keras namun membentuk watak bohong dan licik karena dipaksa harus lulus.

"Selama ini UN terlalu mengandalkan nilai kognitif yang tertulis dengan pada lembar jawaban, apalagi siswa merasa diteror akan suasana ujian yang penuh ketegangan," imbuh Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu menambahkan, jika UN ditiadakan, maka dana yang terlanjur dialokasikan, nanti bisa dialihkan untuk penambahan sarana prasarana sekolah.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini Mendikbud Muhadjir Effendy mewacanakan untuk menghapus UN. Bahkan, ia mengaku sudah dipanggil Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Mendikbud mengatakan, kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Sementara hasil ujian akhir

bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan.

"Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan," jelas Mendikbud. ■

(sf), Foto: Kresno/hr



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Komisi VIII DPR RI Kunjungi Malut Pantau Implementasi UUPA

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Provinsi Maluku Utara untuk mendapatkan informasi terkait Implementasi Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang baru disahkan oleh DPR RI pada masa sidang I tahun 2016-2017.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim yang memimpin kunjungan ini, DPR RI hendak mengetahui mengenai program perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemprov Maluku Utara mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan serta upaya antisipatif ke depan dalam peningkatan perlindungan anak. Khususnya kekerasan terhadap anak, karena menurut informasi diketahui Maluku Utara termasuk daerah yang tinggi tingkat kekerasan.

"Kami juga perlu mengetahui berbagai kendala dan tantangan dalam perlindungan anak selain itu juga kami juga perlu mengetahui alokasi anggaran untuk program program tersebut serta pola koordinasi yang dibangun. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan dialog mengenai isu-isu lain yang sedang berkembang di Provinsi Maluku Utara saat ini," kata Achmad Mustaqim, di Ternate, Senin (28/11).

Dalam kesempatan tersebut Komisi VIII DPR RI berdialog dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Maluku Utara, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Maluku Utara.

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi dengan adanya sinergitas dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak, yang melibatkan berbagai elemen seperti Kanwil Kementerian Agama, Kepolisian, dan Lembaga Swasembada Masyarakat (LSM).

"Kami melihat ada sebuah sinergitas yang berbeda di beberapa daerah yang pernah dikunjungi. Dimana melibatkan elemen-elemen lain contohnya dari kanwil Kemenag, sesuatu yang baru dilibatkan dalam proses perlindungan anak. Selain

itu dari pihak Polda, dilibatkan secara teknis, kemudian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti pusat studi wanita," ungkapnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Hasni, menjelaskan bahwa data kasus kekerasan tahun 2014 taitu sebanyak 115 kasus, didalamnya terdapat 62 kasus anak. Sedangkan data kekerasan tahun 2015, yaitu sebanyak 112 kasus dengan 45 kasus anak.

Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga pendamping dan belum ada jaksa anak dan hakim anak di Provinsi Maluku Utara. Kondisi sarana dan prasarana di Provinsi Maluku Utara, belum memiliki gedung Sekretariat P2TP2A, yang hingga saat ini masih bersifat sewa dan berada di Kota Ternate.

"Kami berharap dengan kehadiran Komisi VIII DPR RI bersama dengan perwakilan Kementerian Perlindungan dan



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim

Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dapat membantu dan mendukung program kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan", tegasnya.

Selanjutnya, Achmad Mustaqim menyampaikan temuan-temuan di lapangan tentunya akan Komisi VIII DPR RI tindaklanjuti dalam pembahasan dengan mitra kerja baik dalam Rapat Kerja dengan Menteri maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I secara khusus. ■

(ab), foto : Agung/br

Komisi X DPR RI Akan Bantu Pengembangan SKOI Kaltim



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Komisi X DPR RI akan memperjuangkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN untuk pengembangan Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Perlu Dikaji Usulan Pemprov Riau Tambah Lima Cabang

Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Ferdiansyah menerima masukan dari Pemerintah Provinsi Riau khususnya Kementerian Olahraga Riau yang meminta tambahan lima cabang olah raga dengan menggunakan pendanaan APBN.

Penambahan lima cabang tersebut bisa memperkuat pemetaan pembinaan prestasi cabang olahraga di provinsi ini. Sebelumnya hanya ada cabang olahraga atletik dan dayung.

"Saya meminta pemerintah harus benar benar mengkaji, jangan sampai usulan tambahan lima cabang tidak sesuai dengan pembinaan prestasi yang mengarah kepada kekuatan olahraga di tingkat nasional," kata Ferdi usai pertemuan dengan Kadispora Provinsi Riau Doni Aprialdi dan jajaran di Pekanbaru, Jumat (25/11) lalu.

Dia berharap jika itu benar akan menjadi pemetaan, termasuk *event* olahraga internasional Indonesia, tidak perlu seluruh provinsi menyampaikan perwakilan cabang olahraganya. Cukup 4-5 provinsi saja yang mengirimkan perwakilan cabang olahraga.

Tim Kunspek juga berkesempatan melihat sarana dan prasarana *venue* yang ada di Provinsi Riau yang sebelumnya dipakai untuk PON tahun 2012.

"Sarana dan prasarana *venue* yang ada di Provinsi Riau sudah cukup bagus, dari

kolam renang, atletik, maupun stadion utama untuk sepak bola dan juga asrama untuk para atlet relatif semua memadai, hanya butuh perbaikan ringan-ringan saja," ujar Ferdiansyah.

Pemerintah Provinsi Riau juga meminta kepada Komisi X DPR RI agar mendorong Kemenpora, KONI dan cabang-cabang induk olahraga yang ada untuk membuat kesepakatan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintahan Provinsi Riau bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan nasional maupun International.

"Hal tersebut akan menjadi catatan kami, dan akan kita bawa di rapat kerja mendatang yang akan mengundang



Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Ferdiansyah kunjungi Stadion Riau

kementerian terkait khususnya Kemenpora, supaya hal ini bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

Ikut serta dalam Kunspek ini anggota Komisi X Bambang Sutrisno dan Marlinda Irwanti (F-PG), Anang Hermansyah (F-PAN), Lathifah Shohib dan Arzeti Bilbina (F-PKB), Anas Thahir (F-PPP), Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem) dan Surahman Hidayat (F-PKS). ■

(as.mp), Foto : Azka/br

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra kepada Parle disela-sela kunjungan ke SKOI Kaltim di Komplek Stadion Utama Palaran, Samarinda, Jum'at (25/11).

SAH (panggilan akrabnya) mengatakan Komisi X DPR RI telah melihat fakta di lapangan mengenai keberadaan SKOI Kaltim yang berdiri cukup megah dan ditunjang dengan sarana olahraga dan sarana representatif.

"Apalagi SKOI Kaltim berhasil mencetak atlet-atlet potensial dan bisa berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Ini merupakan hal yang luar biasa dan perlu untuk dikembangkan di semua daerah," jelas SAH. Untuk itu lanjutnya, sekolah olahraga yang ada di Kaltim ini layak untuk mendapatkan

bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

Ia menambahkan, kedatangan Komisi X DPR RI ke Kaltim sesuai dengan bidangnya yakni Komisi yang membidangi pemuda dan olahraga dan Kaltim ini daerah yang mempunyai sekolah khusus yang memproduksi atlet. "Ini sangat luar biasa," ungkapnya bangga.

"Sejauh ini, program SKOI Kaltim sudah berjalan dengan baik. Tinggal kendala dan kekurangan apa saja yang ada disini nanti akan menjadi bahan laporan kami, dan akan dibicarakan dengan kementerian terkait," terangnya.

Sementara Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kaltim, Agus Tianur berharap kunjungan Komisi X DPR RI ini dapat membantu SKOI Kaltim, terutama di sisi pembangunan.

Agus mengakui bahwa gedung yang ada saat ini masih kurang karena ada sekitar 500 atlet yang dibina disini. Siswa SKOI Kaltim memerlukan gedung baru karena saat ini hanya memiliki satu gedung sekolah dengan tiga lantai. "Jadi, saya rasa belum ideal kelas yang ada," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, masalah peralatan serta *try out* menjadi kendala SKOI Kaltim dalam pembinaan atlet. "Dari 32 cabang olahraga (cabor) yang kami bina ada beberapa cabang yang peralatannya masih minim. Tadi Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR RI, SAH telah meminta proposal kepada kami. Semoga dengan proposal ini Komisi X DPR RI dapat memperbaiki sarana dan prasarana SKOI Kaltim," harapnya. ■

(ruw)foto:awan armanisa/br

Dinas Dikpora NTB Diminta Kreatif

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta untuk kreatif mencari kegiatan-kegiatan bagi pemuda NTB, agar Balai Pengelola Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga (BPPSPO) di Provinsi NTB dapat digunakan dengan baik dan memasyarakat.



Tim Kunspek Komisi X DPR RI saat meninjau BPPSPO di Mataram, NTB

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Kunjungan Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi saat meninjau BPPSPO di Mataram, NTB, Jumat (02/12).

"Dinas Pemuda NTB harus

kreatif dan rajin mencari kegiatan-kegiatan atau *event-event* untuk pemuda agar BPPSPO ini tetap terpakai dan memasyarakat," tukasnya.

Dijelaskan Ria demikian sapaan akrabnya, BPPSPO Provinsi NTB didirikan tahun 2012, saat ini baru

empat tahun. Kondisi BPPSPO NTB masih bagus dan masih layak pakai. Dibandingkan dengan BPPSPO di provinsi lain.

"Artinya ini tetap rutin digunakan khususnya oleh pemuda-pemuda, klub-klub pemuda dan masyarakat NTB pada umumnya," kata politisi dari Gerindra ini.

Tapi, lanjutnya, memang perlu dilakukan perawatan dan penambahan-penambahan fasilitas agar gedung ini tetap bisa digunakan dan tidak mubajir.

Sebelumnya, Tim Komisi X DPR RI yang dipimpin Mujib Rohmat melakukan pertemuan dengan Sekda Provinsi NTB. Tujuan Kunjungan Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai kegiatan kepemudaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. ■

(sel/parasiasat/ntb)

BKSAP Harapkan Hubungan Indonesia-Zimbabwe Lebih Erat Lagi

Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), Rofi Munawar berharap hubungan kerjasama antara Indonesia dan Zimbabwe dapat berlangsung lebih erat lagi. Hal tersebut terungkap saat menerima kunjungan Duta besar Republik Zimbabwe, Alice Mageza di ruang rapat BKSAP, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12).

“Sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi beberapa negara, maka kami menilai perlunya hubungan kerjasama yang lebih erat lagi dengan Zimbabwe. Termasuk hubungan kerjasama DPR RI dengan Parlemen Zimbabwe. Oleh karena itu kami berencana akan mengunjungi negara tersebut,” ujar Rofi.

Sementara itu Duta Besar Zimbabwe mengatakan bahwa sejatinya hubungan kerjasama antara kedua negara tersebut telah berlangsung sejak lama. Bahkan antara Indonesia dengan Zimbabwe juga telah membuat beberapa kesepakatan yang tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding). Sayangnya kesepakatan itu belum sepenuhnya terlaksana alias belum ditindaklanjuti.

Diantara kesepakatan itu adalah mendukung pemberantasan korupsi, meningkatkan industri pariwisata yang telah dibuktikan dengan adanya bebas visa bagi wisatawan asal Zimbabwe. Pemerintah Zimbabwe juga telah mengundang warganya untuk

Komisi VI DPR RI Berharap PT Semen Indonesia Melakukan Investasi kepada Masyarakat

Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Dhamantra mengharapkan, kejadian yang menimpa Semen Gresik atas investasinya yang digugat oleh masyarakat harus menjadi pelajaran yang terakhir. "Saya hanya ingin menekankan saja, apakah secara koorperatif jajaran Direksi Semen Indonesia bisa membedakan bahwa perusahaan ini adalah Badan Usaha Milik Negara, bukan Perseroan Terbatas. BUMN mengemban agen pembangunan," tandasnya pada acara pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan PT SI di Tuban, Jatim, Sabtu (26/11) lalu.

Disebutkan Nyoman, sebagai contoh CSR, itu adalah kewajiban di Perseroan Terbatas, tapi di BUMN hanya istilahnya saja yang diubah menjadi bina lingkungan sedang persepsinya sama. Sebagai agen pembangunan itu ada investasi sosialnya tidak hanya tanggungjawab sosial saja. "Ada investasi sosial yang wajib dilakukan," sebut politisi PDI Perjuangan Dapil Bali ini.

Menurutnya, BUMN harus bisa berpikir untuk bisa membedakan dengan Perseroan Terbatas biasa, yang mengemban misi sebagai agen pembangunan, mendirikan sekolah, mendirikan sarana kesehatan dan lain sebagainya sebagai investasi sosial, pusat-pusat pendidikan di sekitarnya, sehingga penyelesaiannya tidak normatif. "Imej BUMN besar seperti Semen Indonesia ini harus diubah kepada masyarakat setempat agar lebih positif" lanjutnya.

"Sebagai pemain yang *go international*, kasus yang menimpa Semen Gresik sekarang ini memang betul bisa dilakukan oleh lawan-lawan. Tetapi sebagai pemain internasional hal itu seharusnya sudah diantisipasi. Tidak mungkin Semen Indonesia dikasih jalan begitu saja oleh pemain-pemain besar yang begitu menakutkan itu. Kejadian

yang di Rembang itu mereka tidak mau diberikan ganti rugi, itu yang membuat saya percaya dengan penjelasan pak Dirut" ujar Politisi kelahiran 1960 itu.

Ketua Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Tim Kunspek Teguh Juwarno juga menambahkan, CSR ini bukan dianggap hanya sebatas *Coorporate Social Responsibility*, tapi anggaplah ini bagian dari investasi. "Kalau CSR saja kan kadang-kadang kita nunggu kemudian ada nuansa amal. Tapi kalau ini investasi untuk kemudian menjadikan lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Nanti menjadi hijau, masyarakat menjadi mampu, artinya disitu ada timbal balik," jelasnya.

Dia berharap kepada Dirut PT SI hal itu agar didahulukan, sehingga mereka tahu bahwa kehadiran Semen Indonesia memang betul-betul bermanfaat bahkan sebelum perusahaan itu beroperasi. ■



Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Dhamantra



Wakil Ketua BKSAP Rofi Muna'war berbincang dengan Duta Besar Republik Zimbabwe mengenai kerja sama Indonesia dengan Zimbabwe

mengunjungi Indonesia. Selain itu masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi salah satu hal yang tertuang dalam kesepakatan tersebut.

Baik Rofi maupun Alice berharap agar segala kesepakatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dijalankan dengan baik. Keduanya juga mencoba menjajaki dibentuknya GKSB (grup kerjasama bilateral) antara DPR RI dan Parlemen Zimbabwe.

Terkait dengan rencana kunjungan DPR RI ke negara tersebut, Alice menceritakan kondisi negaranya dimana pada tanggal itu tengah berlangsung konferensi. Tidak hanya itu, sebagaimana situasi negara lain, di Zimbabwe juga ada partai oposisi selain partai pemerintah.

Menanggapi hal itu Rofi mengatakan bahwa DPR RI tidak akan

melakukan kontra produktif. Dengan kata lain, DPR RI tidak akan membicarakan masalah politik dalam negeri Zimbabwe, apalagi merancang pertemuan dengan partai oposisi di negara tersebut. Tujuan DPR RI mendatangi negeri Presiden Mugabe itu tak lain adalah ingin mempererat hubungan kedua negara, khususnya hubungan antara DPR RI dengan Parlemen Zimbabwe. Hal itu termasuk salah satu rangkaian dalam penjajakan membentuk GKSB antara DPR RI dengan Parlemen Zimbabwe. ■

(eno.mp), foto: Eka Hindra/br

(Ayu) foto: Naqfuzi/hr

Dewan Berharap Kesejahteraan Guru Meningkat

Hari Guru Nasional diperingati setiap 25 November. Bertepatan dengan momen ini, Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam mempunyai keinginan besar agar kesejahteraan guru bisa lebih baik lagi di masa akan datang. Mengingat, guru adalah pihak yang paling berjasa bagi kehidupan kita di masa akan datang.



Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam

“ Kita ingin guru makin sejahtera, sehingga kami di DPR RI terus berjuang demi guru ini lebih baik. Kita seperti ini karena guru. sehingga dana pendidikan yang sangat besar ini bisa digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pengajaran, juga kesejahteraan gurunya,” kata politisi F-PG itu dalam rilis yang diterima Parlemen, Jumat (25/11).

Politisi asal dapil Jawa Timur itu juga berharap, nasib guru lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. sehingga para guru semakin bersemangat mengajar dan

mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Laila Istiana (F-PAN) mengatakan, guru memiliki peran yang sangat penting, karena di tangan gurulah, anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi bangsa yang cerdas dan berbudi mulia.

"Dalam bimbinganmu kami semua berkarya untuk Indonesiaku adil, makmur, dan bermartabat. Semoga Allah meridhoi pengabdian para guru. Amin," harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

(sf), foto: kreano/br

Pemerintah Diminta Siapkan Program Studi DLP Secara Komprehensif

Ketua Panja Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk lebih komprehensif dalam menyiapkan Program DLP. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kemristekdikti RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/11).



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah

“ Kami ingin Pemerintah menyiapkan lebih komprehensif terkait kesiapan penyelenggaraan Program DLP. Mulai dari penyiapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kurikulum, proses pembelajaran, standar kompetensi, sarana pembelajaran, serta pembiayaan dalam program DLP, ini perlu dipersiapkan sebagai bahan pendalaman dalam Panja Prodi DLP,” ungkap Ferdiansyah.

Lebih lanjut, politisi F-Golkar itu juga meminta pemerintah memberikan kejelasan prinsip secara tugas dan fungsi antara Dokter Umum dengan Dokter Layanan Primer, agar tidak menimbulkan polemik karena dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat.

"Kita belum mendapatkan perbedaan secara tugas dan fungsi antara Dokter Umum dan Dokter

Layanan Primer. Kita ingin mengetahui apa yang didapatkan dengan adanya Program DLP ini dan bagaimana gelarnya, itu semuanya belum dirumuskan sehingga Rapat Kerja kali ini belum mengambil keputusan. Jangan sampai ada rakyat yang dirugikan, baik mahasiswa hingga masyarakat lainnya yang ingin mendapatkan layanan kesehatan," tambahnya.

Selain itu, Ferdiansyah juga menyampaikan akan ada revisi Undang-Undang No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran jika RPP belum juga diselesaikan oleh Menristekdikti RI. "Makanya kita tunggu RPP itu kapan selesainya, kalau lebih dari tiga tahun maka lebih baik kita revisi Undang-Undangnya," ungkapnya. ■

(eva, rnm), Foto: Kreano/br

Kuota Haji 2017 Sebaiknya Masih Gunakan Asumsi 2016 Sebanyak 168.800

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mengingatkan Pemerintah harus mempersiapkan secara matang berkaitan dengan jumlah kuota haji 2017 karena sering simpang siur. Pada musim haji tahun 2016 lalu terinformasi akan ada kuota tambahan, tetapi pada saat-saat akhir, tidak ada penambahan.

Hal itu dikatakannya belum lama ini di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan haji 2017 dan kemungkinan ada tambahan kuota haji. "Pada pelaksanaan haji tahun lalu disebut-sebut ada tambahan 20 ribu tetapi ternyata tidak ada. Ini perlu diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan menghambat persiapan penyelenggaraan haji secara keseluruhan," ujarnya.

Untuk itu, politisi PPP dari Dapil Jateng ini menyatakan, pihaknya lebih merekomendasikan, haji tahun 2017 masih menggunakan asumsi yang sama dengan tahun 2016, yaitu 168.800 terbagai atas haji reguler sebanyak 152.600 dan



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim

sisanya haji khusus.

Terkait dengan pelaporan penyelenggaraan ibadah haji 2016, Mustaqim menyatakan bahwa amanat UU menyatakan bahwa pelaporan

maksimal 90 hari setelah berakhirnya pelaksanaan ibadah haji. Namun dalam dua tahun terakhir, Kemenag selalu menyampaikan *last minute*, atau hanya 1 minggu sebelum jatuh tempo.

Akibatnya lanjut Mustaqim, di panitia internal Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI dalam rangka menyusun biaya ibadah haji mengalami kedodoran. Pasalnya Panja BPIH bekerja tidak hanya lihat penyelenggaraan haji sebelumnya tetapi juga melihat masukan internal maupun evaluasi kunjungan ke berbagai daerah sebagai pertimbangan dan masukan apakah penyelenggaraan haji perlu perbaikan. ■

(mp), foto: jakab/hr

Komisi VIII DPR RI Prihatin Nasib Pengungsi Sinabung

Komisi VIII DPR RI menyatakan prihatin dengan kondisi masyarakat pengungsi Sinabung, karena sampai sekarang tidak ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, padahal erupsi gunung Sinabung sudah terjadi sejak tahun 2010.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi VIII DPR RI Kuswiyanto saat kunjungan spesifik ke Provinsi Sumatera Utara, Senin (28/11).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Iskan Qolba Lubis, Kuswiyanto lebih jauh menyarankan, pemerintah harus menentukan *grand design* untuk menyelesaikan masalah Sinabung itu. Pemerintah pusat punya dana berapa, pemerintah provinsi punya dana berapa, pemerintah kabupaten punya dana berapa, barulah dibuat keputusan.

"Pemerintah harus menetapkan, bahwa selama sekian bulan jaminan hidup pengungsi Sinabung ditanggung oleh pemerintah. Baru kemudian sesuai

perkiraan kalau dia bertani kira-kira berapa tahun baru dapat menghasilkan. Setelah itu dilakukan evaluasi lagi, jangan sampai masyarakat menerima sesuatu yang tidak jelas semuanya," paparnya.

Tetapi yang terjadi di lapangan justru tidak jelas semua, tidak ada kesamaan data antara masyarakat, pemerintah Kabupaten Karo dan bukti yang dimiliki BNPB.

"Saya sebagai wakil rakyat merasa sedih, hal ini menunjukkan seolah-olah pemerintah tidak hadir. Kalau pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan diajak dialog dengan baik, saya yakin tidak ada masalah yang



Anggota Komisi VIII DPR RI Kuswiyanto

tidak dapat diselesaikan," ucap politisi PAN ini.

Kepada Tim Komisi VIII DPR RI, para pengungsi Sinabung menyampaikan, bahwa hidup mereka seperti binatang. Hanya sekadar diberi makan dan tempat tinggal, tetapi tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencari nafkah. Belum lagi masalah pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka. ■

(arf,mp)/foto:arif/br

Parlemen Berperan Dorong Efektivitas Dana Pembangunan

Agenda Pembangunan Berkelanjutan sebagai agenda global dapat terwujud secara efektif hanya dengan kerja sama seluruh pihak, mulai dari parlemen, pemerintah, dan *Civil Society Organization* (CSO), hingga aktor-aktor internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga donor. Demikian tema yang diusung adalah "Parliamentary Forum at the Second High Level Meeting of Global Partnership for Effective Development Cooperation". Forum ini digelar oleh *Inter-Parliamentary Union* (IPU) dan *Global Partnership*, Selasa (29/11) bertempat di Nairobi, Kenya.

Pada Perhelatan Tingkat Tinggi Parlemen tersebut, Ketua Delegasi Republik Indonesia yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyebutkan, bahwa selama ini Indonesia telah berperan aktif dalam banyak forum dan terlibat dalam mekanisme global dan dialog tentang efektivitas dana pembangunan di kawasan.

"Indonesia adalah negara penandatangan *Paris Declaration on Aid Effectiveness*, dan negara pengampu *the Jakarta Commitment for Aid Effectiveness* pada tahun 2009," ucapnya.

Delegasi DPR RI untuk forum ini adalah Nazaruddin Kiemas dan Achmad Fariel dari Komisi VII DPR RI, Ferry Kase dari Komisi XI, dan Zainudin Amali dari Komisi I.

Rofi menekankan perlunya konektivitas yang kuat antara Parlemen dan pemerintah. "Di beberapa negara, masih ada ketimpangan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen dan eksekusi implementasi kebijakan tersebut di lapangan," ujarnya.

Pernyataan itu diamini oleh *Deputy Director, Development Co-operation Directorate* OECD, Brenda Killen. Menurut Brenda, mutual accountability dan kerjasama lintas pemangku kepentingan adalah kunci dari kerjasama pembangunan yang efektif.

Di hadapan anggota Parlemen mancanegara, Anggota Komisi VII DPR RI itu dengan tegas menyuarakan bahwa pemetaan SDGs harus dilakukan secara komprehensif, agar menghasilkan data yang akurat, dan bukan hanya berupa apa

yang disebutnya sebagai "angka manis yang tak menggambarkan kondisi masyarakat secara riil," demi mendorong prinsip *no one is left behind* yang menjadi landasan Pembangunan Berkelanjutan.

Rofi Munawar juga berbagi praktik terbaik Parlemen Indonesia dalam mendorong SDGs. "Praktik terbaik dalam hal efektivitas dana pembangunan dan pengawasan Parlemen di Indonesia adalah bahwa DPR RI telah mendirikan Panitia Kerja (Panja) yang secara khusus menangani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," ujarnya.

Panja SDGs DPR RIDibentuk dengan tujuan untuk membantu perwujudan dan pencapaian seluruh target SDGs dengan meningkatkan kesadaran para anggota parlemen terkait isu-isu, memonitor pencapaian target SDGs serta memberikan saran dan memperjuangkan anggaran dan legislasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam SDGs.

Ia juga menambahkan bahwa "Panja SDGs juga memiliki peran sebagai gerbang diplomasi parlemen dan focal point DPR RIDalam berbagai kerjasama internasional mengenai SDGs." Apa yang disampaikan Rofi disambut antusias oleh para Anggota Parlemen dari berbagai belahan di dunia, yang mengapresiasi langkah tepat



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar

Parlemen Indonesia dalam mendorong percepatan realisasi target Pembangunan Berkelanjutan.

Wakil Ketua BKSAP ini juga mengingatkan forum bahwa "regulasi dan kebijakan terkait SDGs haruslah bersifat konkrit dan menyentuh akar pembangunan. Regulasi dan kebijakan tersebut harus diperbanyak dan dipercepat." Mengingat bahwa "tantangan utama dari eksekusi kebijakan dan regulasi semacam ini biasanya adalah rumitnya birokrasi," pungkasnya. ■

(BKSAP-dto.mp)

DPR RI Prihatin Kasus Doping PON Jabar

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mengaku prihatin dengan adanya dugaan kasus *doping* yang dilakukan 12 atlet daerah dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat 2016. Ia menegaskan, KONI harus bertindak tegas, karena kasus ini jelas mencederai sportivitas yang seharusnya dijunjung oleh para atlet.

“Apalagi temuan kasus *doping* dalam PON Jabar ini lebih tinggi dari PON sebelumnya. Akbarnya, gelar PON Jawa Barat yang demikian megah tidak boleh tercoreng oleh kasus ini. Sehingga wajar kalau atletnya diberi sanksi,” tegas Dadang, usai rapat

Workshop BKD Soroti Masalah Infrastruktur Pendidikan

Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan *workshop* dengan tema "Upaya Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pendidikan" di ruang rapat MKD lama, Gedung Nusantara II, Kamis (1/12). Dalam diskusi kali ini diungkapkan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat sekolah rusak.

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016, sebanyak 18,6 persen ruang kelas SD dan 16,62 persen ruang kelas SMP berada dalam kondisi rusak. Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah menganjurkan kepada pemerintah agar membuat aturan teknis di bawah undang-undang untuk segera menuntaskan masalah buruknya infrastruktur sekolah.

"Kami mengimbau kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan masalah ini ditargetkan beberapa tahun selesai," tandas Ferdiansyah.

Dia juga mengungkapkan Komisi X DPR RI telah membentuk Panja Sarana dan Prasarana (Sarpras) sekolah yang merekomendasikan mekanisme struktural yang mampu mengatasi masalah tersebut. Pemerintah harus mencegah jatuhnya korban karena sekolah roboh, dengan mengelola infrastruktur sekolah secara akuntabel.

"Pemerintah supaya membuat peta jalan, membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum untuk menyelesaikan sarpras ini. Termasuk berapa kebutuhan anggarannya, lalu bagaimana teknis pengawasannya," papar Ferdiansyah.

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) yang terlibat dalam diskusi yang diselenggarakan BKD. Lembaga ini konsen dengan riset dan advokasi di bidang pendidikan, telah melakukan kajian sehingga menemukan ketidakcukupan ruang kelas untuk anak didik.

Ketidakcukupan itu disebabkan oleh

paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Politisi F-Hanura itu menambahkan, ke depannya Lembaga Anti *Doping* yang ada harus didorong agar dari aspek sarana dan prasarana lebih memadai, sehingga atlet yang menggunakan *doping* bisa diketahui lebih cepat.

"Sehingga kitapun bisa bertindak lebih cepat pula. Ini kan masalah pembinaan atlet terutama menyangkut moralitas dan sportivitas, daerah dan panitia kecolongan. Ini pelajaran berharga," imbuh Dadang.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menambahkan, agar hal ini tidak terjadi kedepannya, perlu adanya peningkatan pembinaan kepada atlet, penguatan Lembaga Anti *Doping* hingga penandatanganan fakta integritas. Ia pun memastikan, akan mempertanyakan hal ini kepada Kemenpora, dalam kesempatan

rapat kerja.

Diwartakan sebelumnya, setelah melalui pemeriksaan di *National Dope Testing Laboratory* di New Delhi, India, sebanyak 12 sampel *urine* atlet peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat 2016 diindikasikan mengandung zat *doping*. Ke-12 atlet dengan sampel *urine* positif *doping* itu tampil di cabang berkuda, menembak, serta angkat besi dan binaraga.

Hasil tersebut sudah diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, Ketua Panitia Besar PON Jabar 2016, dan Ketua Umum KONI. Ironisnya, jika dibandingkan dengan temuan pada PON sebelumnya, jumlah temuan kali ini merupakan temuan terbanyak, yaitu 12 sampel *urine* yang terindikasikan positif.

Pada PON Kalimantan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah

ruang kelas yang ada saat ini dalam keadaan rusak sedang hingga berat, dan kekurangan ruang kelas akibat jumlah siswa yang melampaui batas maksimal. Selain itu juga masih buruknya tata kelola rehabilitasi ruang kelas.

Studi yang dilakukan YAPPIKA bersama para mitranya menunjukkan tata kelola rehabilitasi ruang kelas belum cukup transparan, akuntabel, dan partisipatif. ■

(foto mp), Foto: areff/hr

Timur 2008 terdapat lima sampel yang positif mengandung zat *doping*. Sementara pada PON Riau 2012 terdapat delapan sampel *urine* yang positif mengandung zat *doping*. ■

(sf)/foto:krasno/hr



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

Komisi IV Himpun Masukan Untuk Revisi UU Konservasi

Ketua Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali, yang juga Ketua Komisi IV Edhy Prabowo mengatakan, kunjungan spesifik yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengawasi dan melihat langsung peran konservasi yang sudah dilakukan di Bali.

“Kehadiran Komisi IV DPR RI di Provinsi Bali dalam rangka melihat masalah konservasi. Karena dalam waktu dekat kita akan merevisi UU tentang Konservasi,” ujar politisi Gerindra itu Kamis (1/12). Edhy menjelaskan, salah satu konservasi yang dikunjungi Komisi Anggota Dewan adalah PT. Kasianan Bali *Elephant Camp*.

“Kami melihat kegiatan yang luar biasa sekali di sini, tempat ini bisa dijadikan sebagai salah satu model yang harus dicontoh untuk Indonesia secara umum,” ucapnya.

Dikatakannya, sumber daya alam di Indonesia sangat bagus, dan perusahaan ini telah berusaha mewujudkan cita-cita melestarikan kekayaan alam dan budaya nusantara. “Di Bali *Elephant Camp* ini, terdapat gajah yang bisa beternak. Ada dua ekor gajah yang telah lahir, dan dua lagi yang akan dilahirkan,” paparnya.

Menurut Edhy, pemerintah perlu memberikan dukungan, tentang apa-apa saja yang dirasa masih kurang dalam upaya yang telah dilakukan oleh pusat konservasi tersebut.

Edhy mengutarakan, bahwa disamping mengelola satwa, PT. Kasianan Bali *Elephant Camp* juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat sekitarnya, dengan cara memberikan pembinaan tentang peternakan dan pertanian.

“Salah satu produk pertanian yang dihasilkan adalah cokelat, dan di



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo kunjungi PT. Kasianan Bali *Elephant Camp*

tempat ini dibangun juga pabrik pengolahannya. Kedepannya, kita perlu mendorong agar apa yang telah dilakukan oleh perusahaan ini, dapat ditiru dan dijadikan contoh bagi daerah lain,” tuturnya. ■

(dep.rp) Foto: Ryanbr

Perjuangkan Buruh Migran, Delegasi DPR RI Berdebat Soal Definisi *Migrant Workers*

Anggota Delegasi Parlemen RI yang diwakili oleh Arief Suditomo dan Suhartono di Sidang Parlemen Asia berdebat dengan Delegasi Parlemen Bahrain, Saudi Arabia dan Rusia terkait definisi *migrant workers* yang mereka usulkan.

Hal tersebut terungkap saat *Standing Committee Meeting on Social and Cultural Affairs*, mengagendakan penyusunan *draft resolution on protection and promotion of the rights of migrant workers in Asia*, di Siem Reap, Kamboja, Selasa lalu (29/11).

“Salah satu yang mengemuka pada sidang hari ini delegasi dari Bahrain, Saudi Arabia, dan Rusia sama-sama menyatakan bahwa definisi dari buruh migran itu dibatasi berdasarkan kepentingan mereka (buruh migran-red). Yakni hanya orang-orang yang pada dasarnya menjadi buruh migran yang

documented dan buruh migran yang akan menjadi warga negara. Itu merupakan salah satu definisi yang bagi delegasi Indonesia tidak pas dengan kepentingan nasional kita,” kata Arief.

Arief mencontohkan, banyak sekali buruh migran Indonesia yang tadinya *legal documented* itu akhirnya menjadi ilegal atau *undocumented* karena satu dan lain hal, bisa karena disiksa, karena punya masalah, karena satu dan lain hal terjadi antara mereka dan majikannya.

“Nah kepada mereka, kita sama sekali tidak boleh mengesampingkan.



Anggota BKSAP DPR RI Arief Suditomo

Mereka adalah situasi riil dilapangan, mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya juga tidak ingin menjadi warga negara lain, mereka hanya ingin mencari kerja, jadi kalau kita menggunakan definisi dari delegasi Bahrain, Saudi Arabia yang juga didukung oleh Rusia, saya pikir itu salah satu hal dimana kita akan mengesampingkan apa yang menjadi cerita dari orang-orang kita yang menjadi buruh migran di negara-negara lain, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk kita bela kepentingan mereka," tegas Arief.

Ia menambahkan, situasi hari ini adalah bagaimana kita harus

mengemukakan apa yang menjadi posisi dari Indonesia khususnya kepentingan nasional dalam hal membela hak-hak dari buruh migran dalam hal perlindungan.

Arief melanjutkan, bagi Indonesia, jika tidak ada titik temu lebih baik mengambil jalan *deadlock* untuk tidak disetujui sebagai draf resolusi, dibanding Indonesia menyetujui tetapi itu tidak memberikan perlindungan terhadap buruh migran kita.

Arief pun menambahkan atas hal ini rencananya delegasi Indonesia akan melakukan rapat trilateral ditengahi oleh Pakistan, untuk coba merefresh atau

mencari definisi baru atas usulan yang disampaikan oleh delegasi Bahrain dan Saudi Arabia.

Dan, lanjutnya, yang Indonesia inginkan adalah APA mengakui bahwa perlindungan terhadap buruh migran baik yang legal maupun ilegal itu tetap harus dilakukan. "Kita harus berjuang untuk memperhatikan hak-hak buruh migran Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya dalam sidang komite, delegasi Bahrain, Saudi Arabia menyatakan definisi *migrant workers* itu hanyalah orang-orang yang mencari kewarganegaraan di suatu negara. ■

(m), Foto: nitabr

Peradaban Maju Karena Guru

Manusia di belahan dunia manapun akan mengakui dan menyadari bahwa peradaban dunia bisa mencapai kemajuan seperti yang dirasakan sekarang ini adalah karena jasa guru. Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan, jika hal ini dikaitkan dengan konteks Indonesia, capaian bangsa ini tentu tidak bisa dilepaskan dari jasa dan perjuangan para guru dalam mencerdaskan bangsa ini.

“ Bahkan guru dalam kesejarahan Indonesia maupun dalam kondisi kekinian menunjukkan peran yang sangat, bukan hanya berkaitan dengan profesi mengajarnya saja. Tetapi dimanapun guru selalu menjadi tokoh sentral, menjadi rujukan masyarakat dalam bertindak, juga ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,” kata Dadang, dalam

pesan singkatnya kepada Parlemen, Jumat (25/11).

Pada Hari Guru Nasional 2016 yang diperingati setiap 25 November, Dadang menilai perlakuan baik terhadap guru di Indonesia walaupun belum sepenuhnya sebanding dengan pengorbanan guru, nampak mengalami titik terang ketika UU Guru dan Dosen disahkan.

Politisi F-Hanura itu menambahkan, pengakuan atas profesi guru dengan adanya kebijakan sertifikasi dan tunjangan profesi menunjukkan ada perubahan bangsa ini dalam memperlakukan guru dengan lebih baik.

"Namun tentu saja masih banyak guru yang bernasib kurang baik. Guru honor yang banyak tersebar di pelosok tanah air, dengan kesejahteraan yang tidak memadai, status kepegawaian yang tidak jelas, menjadi salah satu masalah yang harus kita tuntaskan bersama," kritisi Dadang.

Selain itu, menurutnya di daerah masih banyak sekali ditemukan sekolah dengan guru PNS yang sangat minim, hanya berjumlah dua atau tiga guru. Pengajar di daerah-daerah masih

didominasi oleh guru-guru honor.

"Sampai sekarang guru honor itu sedang memperjuangkan nasibnya agar statusnya menjadi jelas. Banyak sekali kepala daerah yang tidak mau memberikan SK kepada guru honor yang bekerja di sekolah milik pemerintah sehingga mereka sulit mendapatkan sertifikasi maupun NUPTK karena syaratnya harus ada SK Pengangkatan," nilai Dadang.

Ironisnya lagi, masih kata Dadang, beberapa waktu yang lalu seringkali guru dihadapkan pada masalah gugatan hukum ketika mereka sedang mendidik dengan melakukan penegakan disiplin. Padahal menurutnya, guru yang memang sekali-kali perlu berlaku tegas kepada anak nakal untuk menjadikan anak itu lebih baik, harus berhadapan dengan tuntutan hukum orangtua yang tidak terima, bahkan ada juga yang menerima perlakuan kasar.

"Tentu ke depannya sekolah sebagai taman belajar harus menjadi tempat interaksi yang sehat antara guru, siswa dan orangtua. Dan dalam hal ini posisi sentral guru adalah sangat kita perlukan," pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu. ■

(sf), Foto: Kresno/hr



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

PT Semen Indonesia Rembang Diminta Lakukan Pendekatan dengan Penggugat

Anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaedi minta agar keberadaan kelompok yang menggugat keberadaan PT Semen Indonesia di Rembang ini untuk diperhatikan karena tidak menutup kemungkinan keberadaannya ditunggangi oleh LSM. Ia pun mengajak perusahaan BUMN ini untuk melakukan pendekatan dengan penggugat.

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Semen Indonesia yang berlokasi di Rembang, Jawa Tengah pada Sabtu, (26/11).

"Saya setuju dengan melakukan pendekatan terhadap pihak penggugat yang selama ini tidak setuju dengan pabrik semen di Rembang. Para penggugat ini hanya sebagian dari masyarakat dan dia berada di bawah tangan LSM. Itu perlu diperhatikan juga," jelas Slamet.

Selain mengajak untuk melakukan pendekatan kepada kelompok penggugat, Politisi Nasdem ini juga mengajak kepada seluruh unsur di DPR RI untuk memberi dukungan kepada PT Semen Indonesia, karena perusahaan ini milik negara.

"Sekarang kita dari DPR RI adalah bagaimana mendukung secara politik kepada PT Semen Indonesia karena ini merupakan perusahaan negara, ayo kita dukung bareng-bareng secara politik," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wahid juga menegaskan kalau yang menolak pendirian pabrik semen di Rembang ini hanya oleh segelintir orang saja bahkan tidak lebih dari 5%. Ia pun sepakat untuk mengawal agar pembangunan PT Semen Indonesia ini dapat terus berjalan.

"Kami, Komisi VI sepakat dengan gubernur, kapolda dan pangdam untuk mengawal agar pembangunan pabrik ini terus berjalan," tegas Wahid.

Direktur Semen Indonesia, Gatot Kustyadi mengatakan progres pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang per 31 Oktober 2016 telah mencapai 97,1%.

Pendirian pabrik dengan rencana investasi sebesar Rp4,9 triliun ini, diyakini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Rembang. Di antaranya penyediaan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi masyarakat, pembinaan UMKM, pemenuhan kebutuhan air, peningkatan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan.

"Penyerapan tenaga kerja dalam masa pengerjaan proyek mencapai 6.075 orang, dengan tenaga kerja dari Rembang sebanyak 1.236 orang. Kami berharap dengan adanya pabrik Semen Indonesia ini, angka kemiskinan di Rembang dapat berkurang dari 19,5% menjadi di bawah 10%," ungkap Gatot Kustyadi.

Selain itu, pendirian Pabrik Semen Indonesia di Rembang akan memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. Semen Indonesia melalui



Anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaedi

berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp7 miliar pada tahun 2014, meningkat menjadi Rp10,35 miliar pada tahun 2015.

"Tahun 2016 ini, Semen Indonesia menganggarkan Rp35 miliar untuk program CSR di Rembang. Kami berharap program CSR ini dapat mensejahterakan warga Rembang," ungkap Gatot Kustyadi.

Kunjungan spesifik yang dilakukan Komisi VI DPR RI ini merupakan tindak lanjut atas hasil putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) terkait izin pabrik Semen Indonesia di Rembang beberapa waktu yang lalu. Selain mengunjungi Rembang, Jawa Tengah, Komisi VI DPR RI juga mengunjungi Tuban, Jawa Timur. ■

(b.s.m.p.). Foto: Handra/br

Komisi VI DPR RI Kagumi PT Semen Indonesia Lestarkan Lingkungan

Tim Komisi VI DPR RI mengaku kaget melihat langsung kondisi pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Tuban. Sebab, kondisi pabrik perusahaan semen milik BUMN itu tak seperti yang dibayangkan. Karena itu, saat melihat langsung ke pabrik, Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI minta ditunjukkan lokasi-lokasi yang menjadi pusat produksi, termasuk lokasi bahan baku diambil.

“Terus terang ini tidak seperti ekspektasi saya tentang pabrik semen. Kalau lewat di daerah Cibinong yang ada pabrik semen kita bisa tahu. Namun, kondisi di sini sangat jauh berbeda,” ujar Ketua Komisi VI DPR

RI Teguh Juwarno saat di lokasi. Tuban, Sabtu (26/11).

Sebanyak 11 anggota komisi yang membidangi BUMN ini berkunjung langsung ke pabrik semen tersebut. Teguh

Juwarno mengaku, saat baru masuk ke lokasi pabrik, dia langsung disambut dengan pemandangan hijau dan segar. Udara yang sejuk dan lingkungan yang asri. Lokasi tempat produksi juga sejuk. "Karena selama ini pabrik

semen itu identik dengan debu, asap dan lingkungan yang gersang. Namun di sini kesan itu terbantahkan. Karena ternyata Semen Indonesia ini bisa menjaga dan melestarikan lingkungan. Tadi kita lihat pemandangan yang hijau dan romantis," tambahnya.

Semen Indonesia menurut dia, bisa menjadi teladan. Sebab, sebagai produsen semen utama di Indonesia, dalam menambang untuk bahan baku sangat memedulikan kelestarian lingkungan. Sehingga, dia meminta apa yang dilakukan PT Semen Indonesia itu bisa menjadi standar pengelolaan pabrik semen di seluruh Indonesia. "Apa yang dilakukan di Tuban ini bisa di bawa ke mana-mana. Bahwa pengelolaan pabrik semen mestinya ya seperti ini," katanya.

Politisi PAN ini setelah menyaksikan langsung ke lokasi bekas tambang, ternyata, tidak seperti yang dia bayangkan. Lahan bekas tambang ternyata sudah dikelola



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno

dengan sangat baik. Ada danau-danau di lahan bekas tambang yang dijadikan kolam keramba untuk budidaya ikan. Air dari danau itu digunakan untuk irigasi areal pertanian warga. "Sehingga setahun bisa panen tiga atau empat kali. Ini bagus. Ke depan juga bisa menjadi destinasi wisata," terang dia.

Kemudian, di lahan bekas tambang lainnya sudah direklamasi dengan ditanami

berbagai pohon yang bisa menjadikan nilai tambah. Salah satunya hutan jati dan sebagainya. Sehingga, Teguh tak melihat wilayah gersang di lahan bekas tambang karena semua dikelola dengan baik. "Semua sudah bagus. Sekarang jika ada yang masih mempersoalkan kami bisa menjawab dan memberikan penjelasan," tandasnya.

Usai dari lapangan, Teguh Juwarno yang didampingi Sartono Hutomo, Dwie Arum Hadiati, Darmadi Duriyanto dan Kholilurrohman. Selain itu Andriyanto Johansyah, Habib Mustofa Assegaf, Bambang Haryo, Syekh Matriagung, Nyak Kadir dan Nyoman Damarte tersebut menerima penjelasan mengenai perusahaan dari Dirut PT Semen Indonesia Rizkan Chandra. Pertemuan digelar di ruang Wijaya Kusuma lantai 7 kantor pusat PT Semen Indonesia. ■

(enamp) foto: Kresno/br

Legislator Sayangkan Riau Tidak Miliki Sekolah Tinggi OR

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah (F-PAN) menilai, Provinsi Riau memiliki sarana dan prasarana cabang olah raga (cabor) sudah sangat lengkap, tetapi sangat disayangkan jika di provinsi ini tidak ada sekolah tinggi khusus untuk olahraga.

“ Kami akan mendorong pemerintah pusat mau membantu dan memfasilitasi pemanfaatan cabor yang ada di Provinsi Riau, karena fasilitas yang ada di daerah ini sangat mumpuni. Kami juga meminta pemerintah pusat harus cepat dalam menyelesaikan masalah ini, karena fasilitas semewah ini harus dirawat dan diperhatikan lagi, "ujar politisi Dapil Jatim ini setelah melakukan kunjungan ke stadion utama Riau, Jumat (25/11) lalu.

Lebih lanjut Anang menegaskan, ke depannya Komisi X DPR RI akan segera mengundang pemerintah terkait, khususnya Kemenpora pusat untuk mendiskusikan permasalahan ini. Komisi X DPR RI juga akan mensupport bagaimana mengusulkan masalah ini, karena sangat disayangkan jika fasilitas yang semewah ini dibiarkan begitu saja.

Provinsi Riau, tambah Anang, Riau juga sudah mengupayakan hal-hal yang luar biasa untuk menjadi tempat olahraga atau event nasional maupun internasional untuk dilakukan di wilayah ini fasilitasnya sudah luar biasa.

"Di sisi lain, daerah juga jangan hanya meminta dana saja dan berharap bantuan. Itu bukan suatu solusi, karena jika pemprov tidak mempunyai solusi kreatif, maka hal itu hanya akan menjadi percuma. Provinsi ini sudah memiliki tim yang kuat mestinya bisa mengefisienkan *maintenance*. Dibutuhkan juga kreatifitas tinggi dan inovasi bagaimana cara mengelola *venue* yang mempunyai lahan seluas 65 hektar tersebut," ujar Anang.

Ke depan, Anang berharap Provinsi ini jangan selalu bergantung pada



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau Stadion Utama Riau

pemerintah pusat, karena ini akan menjadi kesinambungan yang panjang. Pemerintah pusat tidak akan pernah cukup keuangannya untuk anggarkan 34 provinsi dan 514 kabupaten/ kota. "Mungkin di awal akan dibantu managemennya, setelah itu diharapkan Riau bisa menjadi mandiri," kata Anang menambahkan. ■

(azkmp) foto: Azka/br

Subsidi Ferry Jarak Jauh Matikan Ekonomi Rakyat

Rencana PT. ASDP yang akan membuka rute perjalanan ferry jarak jauh antara Lembar (NTB)-Surabaya (Jatim), menuai kritik tajam. Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, pengoperasian ferry jarak jauh tersebut berpotensi merugikan negara karena bakal menyedot subsidi sangat besar dan sama sekali tidak bermanfaat.

“Ferry jarak jauh ini tidak ada manfaat apa-apa terhadap disparitas harga ataupun pariwisata. Hanya menghamburkan anggaran negara dan mematikan ekonomi rakyat di sekitar pelabuhan,” katanya lewat sambungan telepon, Senin (28/11). Bambang melihat, lintasan Lembar-Surabaya secara bisnis tidak layak, karena tarif ferry lebih mahal dibandingkan tarif kapal petikemas. Tidak heran, jika Menhub Budi Karya Sumadi menjanjikan subsidi untuk menghidupi lintasan itu.

Dia memperkirakan tarif ferry Lombok-Surabaya Rp6 juta-Rp8 juta (break even point), lebih tinggi daripada tarif petikemas Rp1,5 juta. "Subsidinya jelas akan besar sekali. APBN terkuras untuk menghidupi lintasan yang tidak perlu itu." Bambang pun menilai pernyataan Menhub bahwa ferry jarak jauh akan menghilangkan disparitas harga, tidak tepat. Sebab, selisih harga barang antara Lombok dan Surabaya relatif kecil, bahkan beberapa bahan pokok di Lombok lebih murah.

Mengutip data Kementerian Perdagangan per 23 November, harga beras di Lombok Rp9.300 per kg. Sedangkan di Surabaya Rp9.500 per kg. Harga cabai di Lombok juga lebih murah yakni Rp41.000 per kg. Sementara di Surabaya Rp56.000 per kg. Beberapa bahan pokok lainnya juga relatif lebih murah di wilayah timur itu. Bambang juga membantah bahwa arus truk dari Lombok ke Jawa yang melalui Bali menjadi penyebab kerusakan jalan dan mengganggu pariwisata.

Menurut dia, arus truk Padang Bai (Bali)-Lembar saat ini hanya 130-an unit per hari. Sementara arus truk Ketapang (Jatim)-Gilimanuk (Bali) mencapai 3.500 unit per hari. Artinya, truk dari Lombok ke Jawa yang melalui Bali sangat sedikit dibandingkan jumlah truk yang beroperasi di wilayah Bali sendiri yang diperkirakan lebih dari 10.000 unit.

"Tidak beralasan jika dikatakan truk

dari luar Bali yang merusak jalan dan membuat macet. Justru pariwisata di Bali tumbuh karena dilalui angkutan barang, di antaranya untuk kebutuhan Bali juga," ungkapnya. Bambang menegaskan, ferry jarak jauh itu akan mematikan lintasan Padang Bai-Lembar yang dirintis oleh ASDP sejak 1980-an. Jika pelabuhannya tutup, kerugian ASDP akan tambah bengkok.

Sebanyak 33 kapal yang melayani lintasan itu juga akan menganggur karena pasarnya diambil alih ferry jarak jauh yang disubsidi. Politisi Partai Gerindra itu, memperkirakan 3.000 orang akan kena dampak langsung, yaitu sekitar 2.000 kru kapal (60 kru per kapal) dan 1.000 kru pelabuhan. Jumlah ini belum termasuk masyarakat yang selama ini wilayahnya dilintasi truk dan mencari nafkah di pelabuhan, seperti pedagang, rumah makan, jasa angkutan, dan sebagainya.

"Dampak ekonomi dan sosialnya sangat besar. Ironis sekali ASDP menggunakan subsidi yang justru bisa membunuh usahanya sendiri, mematikan ekonomi rakyat, dan memicu masalah sosial," tandasnya. Dia pun mengingatkan Menhub dan ASDP agar tidak memanfaatkan proyek ferry jarak jauh



Anggota Komisi VI DPR RI
Bambang Haryo Soekartono

hanya untuk menyelamatkan ASDP yang merugi di lintasan Merak-Bakauheni karena lima kapalnya tidak bisa beroperasi optimal.

Menurut politisi dari dapil Jatim I ini, masalah ASDP di Merak-Bakauheni akibat kegagalannya sendiri menyelesaikan dermaga 6 dan 7 pada tahun ini, selain kesalahan Kemenhub mengobrol izin di lintasan itu. Padahal, ASDP sudah disuntik penyertaan modal negara Rp1 triliun tahun lalu untuk segera merampungkan dermaga kembar tersebut. "Kesalahan ini merugikan masyarakat. KPK harusnya turun tangan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar," tutup Bambang. ■

(mb), Foto: rmi/fbr

RS Pertamina Balikpapan Bisa Jadi RS Percontohan

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Bakri, menilai Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB) Kalimantan Timur, layak menjadi contoh rumah sakit lain dalam hal pelayanan kesehatan kepada Anggota DPR RI beserta keluarganya. Pasalnya, fasilitas rumah sakit (RS) sudah cukup memadai.

Demikian dikatakannya usai mengikuti kunjungan kerja BURT ke RSPB di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (28/11). Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT Elva Hartati (F-PDI Perjuangan, dapil

Bengkulu) itu langsung disambut Direktur RSPB, Syamsul Bahri, dan pendampingan dari PT. Jasindo, sebagai provider asuransi DPR RI.

"Saya pikir rumah sakit yang lain siap untuk menampung pejabat negara maupun Anggota DPR RI. Sehingga PT. Jasindo

Stabilkan Harga Sembako dengan Peningkatan Produksi

Peningkatan produksi dan pengaturan tata kelola bahan pokok oleh pemerintah diharapkan menjadi solusi dalam menangani masalah harga sembako yang mengalami kenaikan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (24/11).

“ Kita melakukan pengawasan tentang kondisi pasar kita saat ini, bahwa harga-harga bahan pokok mulai meroket dan tidak bisa dikontrol. Masalah krusial saat ini karena tata kelolanya yang belum beres. Harga seolah-olah diatur oleh sekelompok orang tertentu sehingga kita minta peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut,” tegas Edhy.



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo

Politisi F-Gerindra itu menekankan, dugaan pengaturan harga oleh kelompok tertentu menjadi masalah yang wajib ditindak tegas oleh pemerintah. Hal tersebut karena melambungnya harga tidak dinikmati oleh petani melainkan oleh pihak lain dalam proses distributor.

"Terjadi rasa ketidakadilan karena harga begitu melambung, sementara

kenaikan tersebut tidak dinikmati oleh petani sebagai produsen melainkan oleh pedagang yang tidak dapat di kontrol. Maka dari itu kita butuhkan peran pemerintah dalam mengatasi hal ini. Karena jika harga begitu tinggi, inflasi dan ekonomi akan berpengaruh," imbuh Edhy.

Di sisi lain anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono juga menegaskan sekitar

280 Triliun setiap tahun keuntungan di sektor pangan hanya diterima oleh para pedagang. "Harga bahan pokok dari petani itu sangat rendah, tetapi pada saat dijual oleh para pedagang sangat tinggi. Ada sekitar 280 Triliun setiap tahun keuntungan tidak dinikmati oleh petani, melainkan para pedagang yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Politisi asal dapil Jawa Barat VIII itu berharap agar Kementerian Pertanian untuk meningkatkan

kinerjanya dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. "Kita minta Kementerian Pertanian untuk bekerja lebih keras lagi dalam menindak secara tegas dengan mengontrol harga-harga bahan makanan pokok di pasar untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan di Indonesia," imbuhnya. ■

dapat memperluas kerjasama dengan beberapa RS di daerah. Karena kita ketahui, sakitnya orang itu tidak bisa kita prediksi. Jangan berpikir di daerah itu selalu ada RS Pertamina," kata Bakri.

Politisi F-PAN itu menambahkan, RS lain dapat menjadikan RSPB sebagai contoh untuk standar pelayanan kepada Anggota DPR RI beserta keluarganya. Walaupun tidak harus memenuhi standar yang sama dengan RSPB, setidaknya sudah cukup mendekati standar pelayanan RSPB.

"RSPB sudah berdiri cukup lama. Wajar mempunyai pelayanan yang baik. Paling tidak RS-RS lain memiliki standar pelayanan mendekati, dengan mencontoh

RSPB. Karena RS yang bekerjasama dengan pihak Jasindo, sudah memiliki standar pelayanan sesuai dengan aturan. Sehingga standar itu harus terpenuhi semua," imbuh Bakri.

Bakri juga mengingatkan kepada Direksi RSPB, pelayanan kesehatan yang harus mendapat tindakan cepat, agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat juga. Jangan sampai terbentur hal-hal seperti administrasi. Hal itu bukan hanya untuk Anggota DPR RI, namun juga untuk masyarakat umum.

"Mudah-mudahan RS lain yang bekerjasama dengan asuransi Jasindo, bisa menjadi pelayan yang baik, bukan hanya



Anggota BURT DPR RI Bakri

kepada pejabat negara, tapi juga seluruh masyarakat," pesan politisi asal dapil Jambi itu sembari mengingatkan agar Direksi RSPB meningkatkan koordinasi dengan PT. Jasindo. ■

Pintu Masuk Pendidikan Adalah Kesejahteraan Guru

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan, Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November, seharusnya dipandang sebagai momentum meneguhkan keberpihakan pemerintah pada kualitas pendidikan.

“ Karena, pintu masuk mutu pendidikan adalah kesejahteraan para guru. Jadi, keberpihakan pada kesejahteraan guru merupakan jalan pintas untuk peningkatan mutu pendidikan,” tegas politisi F-Gerindra itu saat dihubungi Parlemen via telepon, Jumat (25/11).

Menurut politisi yang akrab dipanggil SAH itu, guru memegang peranan penting dalam menciptakan Generasi Emas Indonesia di masa mendatang. Sehingga, kesejahteraan guru pun harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah.

"Jangan sampai karena kurangnya honor dalam menjalankan profesi guru, mereka harus bekerja keras setelah



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

mengajar di sekolah. Harus ada yang menjadi tukang ojek, berjualan, bahkan pemulung sampah. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas guru itu sendiri," kritisi Sutan.

Menurutnya, dengan hadirnya sertifikasi, diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan guru. Sehingga, guru dapat fokus pada peningkatan kualitas diri guru, dalam memberikan ajaran kepada anak didiknya. Penerimaan guru juga harus lebih selektif.

"Seleksi penerimaan guru juga harus mendapat perhatian dari Pemerintah. Karena, jika kualitas guru tidak maksimal, hal itu pula akan berpengaruh pada kualitas anak didiknya," imbuhan politisi asal dapil Jambi itu.

Sutan juga melihat, masih minimnya jumlah guru-guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah. Pengajar di daerah masih didominasi oleh guru honorer. Selain itu, masih adanya gugatan hukum yang diterima oleh guru, karena dinilai orang tua murid terlalu berlebihan dalam mengajar.

"Gugatan hukum kepada guru itu tidak boleh terjadi lagi. Guru juga berhak untuk menindak murid yang tingkah lakunya sudah di luar batas wajar. Jika orang tua kurang berkenan, seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu," pesan Sutan. ■

(9/). Foto: Kreano/br

Perlu Kajian Mendalam Soal Pembentukan Parlemen Asia

Delegasi Parlemen DPR RI menyambut baik usulan pembentukan Parlemen Asia yang namun transformasi APA ke Parlemen Asia harus diteliti dengan seksama serta diprakarsai oleh penguatan organisasi dalam hal kontribusinya untuk menyelesaikan isu-isu global melalui jalur diplomatik.

Demikian dikatakan anggota delegasi Parlemen Indonesia Sartono saat menyampaikan paparannya di Sidang APA, *Special Committee On Creation Of Asian Parliament*, di Siam Reap, Kamboja, Selasa (28/11).

"Kita harus mengakui bahwa pembentukan Parlemen Asia merupakan upaya jangka panjang. Disini kami mendorong sekretariat nasional APA guna memperkuat kemitraan dan jaringan yang akan memungkinkan pertukaran informasi mengenai hasil parlemen di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, dalam sebuah karya transparan, adil dan produktif," kata Sartono dihadapan 25 delegasi parlemen di kawasan Asia.

Sebagai awal misalnya, lanjut Sartono,



Anggota BKSAP DPR RI Sartono

nama-nama anggota parlemen harus tersedia di website APA, serta undang-undang nasional APA, dan memberikan ruang dan kemudahan untuk harmonisasi kebijakan di seluruh wilayah.

"Mendirikan Parlemen Asia sulit, meskipun tidak mustahil. Namun kita perlu penelitian lebih dalam pada kemungkinan,

tantangan dan peluang. Hal ini mengingat keragaman di wilayah Asia. Untuk itu kami mendorong setiap negara anggota APA untuk melakukan riset komprehensif secara independen, khususnya pada dampak dari pembentukan parlemen Asia untuk ekonomi mereka dan stabilitas sosial politiknya," tambah Sartono anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat ini.

Delegasi DPR RI dalam sidang APA ke-9 kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP, Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Sartono (F-PD), dan M. Arief Suditomo (F-Hanura). Asian Parliamentary Assembly dibentuk pada tahun 2006, dan saat ini memiliki keanggotaan sebanyak 42 negara dan 17 observers. ■

(10/). Foto: Nita/br



Tim Komisi VIII DPR RI menyerahkan mobil secara simbolis kepada Badan PP-PA Maluku

Terima Mobil, Badan PP-PA Malut Diharapkan Kerja Lebih Maksimal

Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan secara simbolis sebuah mobil kepada Badan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Provinsi Maluku Utara dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam rangka kunjungan spesifik Komisi VIII di Provinsi Maluku Utara.

Komisi VIII mengharapkan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dapat lebih maksimal dan dapat bekerjasama secara sinergis dengan elemen lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2a), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Maluku Utara, Kanwil Kementerian Agama, dan Lembaga Swasembada Masyarakat yang konsen dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara harus lebih giat dalam melaksanakan program kerja dan meningkatkan kinerjanya dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak," kata

anggota Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI Zulfadhli, di Ternate, Senin (28/11).

Selanjutnya, politisi Partai Golkar ini mengharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dapat lebih fokus dalam mensosialisasikan Implementasi Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

"Pada tahun 2017 mendatang diharapkan kita dapat lebih fokus dalam mensosialisasikan peraturan perundangan terkait perlindungan anak termasuk akibat dan sanksi-sanksi hukumnya," tegasnya. ■

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menyerahkan bantuan traktor kepada perwakilan gabungan kelompok tani, Kabupaten Bogor

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI Nauroji saat mengunjungi GOR Sudiang Sulsel dan Asrama Atlet
Foto : Eka Hindra/hr.



Badan Keahlian DPR RI gelar Workshop dengan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
foto : Azka/hr.